

**ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) UNTUK MEMBANGUN
EKONOMI LOKAL**

(Studi Kasus Pada Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam
Universitas Alma Ata Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

YUSUP SUKMAN JAYADI
NIM: 132200049

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Yusup Sukman Jayadi: Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Melalui Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Untuk Membangun Ekonomi lokal.

Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan program PNPM-Mandiri (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat diperdesaan yang tertinggal. Untuk melaksanakan lokasi program kegiatan maka dibentuklah UPK (unit pengelola kegiatan) yang merupakan salah satu pelaku pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan. PNPM-Mandiri memiliki 2 program yaitu, program fisik dan non fisik yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi lokal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peneliti kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Serta menggunakan teknik validitas data triangulasi yaitu menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat memberikan dampak kesejahteraan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara-negara terbelakang. Kendati studi perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi sejak kaum Markantalitis dan Adam Smith sampai Marx dan Keynes, namun mereka hanya tertarik pada masalah yang pada hakikatnya statis dan umumnya lebih dikaitkan dengan kerangka acuan lembaga budayada atau sosial budaya Eropa Barat.¹

Pembangunan adalah merupakan proses natural dalam mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran masyarakatnya ditandai dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat karna pendapatannya juga ikut meningkat. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang semakin meningkat pula. Proses natural diatas dapat terlaksana jika asumsi-asumsi jika pembangunan yang ada, yaitu kesempatan kerja atau partipasi termanfaatkan secara penuh (*full employment*), setiap orang memiliki kemampuan yang sama (*equal productivity*), dan masing-masing pelaku bertindak rasional (*efficient*) dapat dipenuhi.²

Berbagai strategi pembangunan selama ini, namun berbagai strategi tersebut belum secara signifikan mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Disaat Bangsa Indonesia dilanda krisis Moneter yang berdampak pada

¹ Jhingan, *ekonomi pembangunan dan perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 3

² *Ibid*, hlm. 4

krisis kepercayaan terhadap kabilitas pemerintah, menyebabkan berbagai masalah-masalah pembangunan, yang perlu dipecahkan terutama dalam membuat strategi pembangunan yang ideal sesuai kondisi masyarakat.

Menurut Prof. Cairncross dengan tepat menyatakan: “pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi. Yang mencakup semua aspek perilaku Masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban, kecermatan dalam hubungan bisnis, termasuk hubungan dengan instansi yang berkaitan dengan penerimaan Negara, hubungan antara keluarga, buta huruf, keakraban dengan peralatan mekanis dan sebagainya³

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi adalah proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam Negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga Negara itu sendiri. Pembangunan harus diprakasai oleh Negara dan tak dapat dicengkokkan dari luar. Kekuatan luar setidaknya bisa merangsang dan membantu kekuatan Nasional. Ia hanya bersipat membantu, tidak mengganti. Bantuan luar Negeri hanya dapat mengawali atau merangsang pembangunan dan tidak untuk mempertahankannya. Semangat membangun harus datang dari dalam, tanpa itu prakarsa pembangunan akan terbuang percuma dan akan segera paham. Prof. Cairncross mengatakan dalam hal ini: “pembangunan tidak akan mungkin jika ia tidak terkena di hati Rakyat.” Terlalu banyak bergantung pada bantuan Luar Negeri akan mematikan prakarsa pembangunan dan memberikan kebebasan kepada investor asing untuk mengurus sumber-sumber alam untuk kepentingan dan

³ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 41

keuntungan mereka saja. Prof. Paul Baran berpendapat, bantuan seperti itu sama halnya dengan mengajak rakyat Negara terbelakang untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka. Oleh karena itu agar proses pertumbuhan ekonomi dapat berumur panjang dan bersifat kumulatif maka tidak boleh bergantung dengan Negara lain supaya pembangun dalam Negeri yang harus ditingkatkan.⁴

Penduduk merupakan faktor produksi utama yang tersedia di negara-negara yang relatif terbelakang dan juga merupakan faktor yang berlebihan. Karena itu mobilitas dari kekuatan-kekuatan penduduk ini untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan akan sangat baik dan dengan cara yang sesuai dengan masyarakat di situ akan menghasilkan suatu kemajuan yang sangat pesat.⁵

Telah kita ketahui bahwa semakin lama semakin sulit kita mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga banyak sekali terjadi pengangguran. Oleh karena itu melalui instruksi Presiden No. 4 tahun 1995 Pemerintah mengimbau agar para generasi muda menumbuhkan semangat kepelaporan untuk menjadi wirausahawan. Sampai saat ini, peluang untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang produktif dan dapat bertahan ditengah-tengah globalisasi ekonomi masih merupakan tantangan yang besar bagi para generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan di sebagian besar negara-negara berkembang, termasuk juga Indonesia.⁶

⁴*Ibid*, hlm. 43

⁵ M. suparmoko, *ekonomi pembangunan*, edisi 5, cetakan BPFE-Yogyakarta, hlm 222

⁶Danang sunyoto, *Kewirausahaan untuk Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013) hlm. 1

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber ekonomi di Indonesia. Yang mana jumlahnya yang sangat signifikan dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UMKM, dengan demikian dapat menunjang perekonomian suatu negara. Perkembangan UMKM menjadi faktor pendukung berbagai macam usaha baik usaha kategori mikro, kecil dan menengah, khususnya di kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain dikenal dengan istilah kota Pelajar juga dikenal sebagai kota dengan sejuta wisata alamnya, yang sudah menarik masyarakat dunia baik itu domestik maupun internasional, kota dengan ciri khas makanannya (kuliner) dan juga kota kerajinan tangan batik tulis, batik kayu dll.

Membangun masyarakat Desa mempunyai peranan penting dalam membentuk kapital, yang merupakan gatra penting dipandang dari sudut pembangunan ekonomi. mobilitas tenaga-tenaga sukarela melalui program-program pembangunan masyarakat desa ini merupakan faktor penting, karena dapat membentuk dasar-dasar perekonomian dari fasilitas-fasilitas sosial seperti jalan-jalan, sekolah-sekolah dan sebagainya. Sudah tentu dengan jalan gotong royong dapat dihemat biaya pembangunannya.⁷

Agar menaikkan hidup suatu masyarakat serta untuk mengurangi kemiskinan dalam suatu negara diperlukan pembangunan disegala bidang, baik bidang sosial, pendidikan, hukum, bidang ekonomi dan lainnya. Pembangunan disegala bidang itu sangatlah penting sebab tiap-tiap bidang adalah saling berhubungan dan

⁷*Ibid, hlm. 225*

saling mempengaruhi, sehingga apabila pemerintah mengabaikan tugas-tugas dilapangan lainnya diluar ekonomi maka hasil terakhirnya bukanlah pembangunan, melainkan mungkin sekali kekacauan dilapangan ekonomi⁸

Paradigma pembangunan Nasional saat ini sebagai kelanjutan paradigma sebelumnya adalah paradigma pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan perkotaan secara berkelanjutan, masyarakat perlu diperhatikan dan harus diberdayakan secara maksimal sehingga masyarakat bisa meningkatkan pendapatannya dan masyarakat juga harus ikut aktif dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengapresiasian dan pemeliharaan hasil pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa dan Negara serta membutuhkan kerja keras yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di Indonesia, pentingnya peran Negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik dibidang kesejahteraan rakyat dilandasi oleh perspektif historis, idiologis, logis dan universal. Sebagaimana yang di kemukakan oleh; Edy Suharto, sebagai berikut:

1. Secara historis, pendiri bangsa memilih model Negara kesejahteraan dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

⁸ DRS.H. Siagian, *pembangunan ekonomi dalm cita-cita dan realita*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 20.

2. Secara idiologis, sila-sila dalam pancasila menegaskan kerinduan Indonesia akan adanya keadilan sosial bagi segenap warga.
3. Secara logis, Indonesia adalah Negara yang berpenduduk lebih dari dua ratus juta jiwa, dengan separuh (untuk tidak menyatakan seberapa besar) warganya masih terhimpit kemiskinan, kebodohan dan ketelantaran. Karenanya sangat absurt jika negeri ini tidak membutuhkan keterlibatan Negara dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya.
4. Secara universal, tidak ada system pemerintahan di dunia ini yang tidak memberikan peran kepada Negara untuk menjalankan pembangunan kesejahteraan social.⁹

Secara universal, tidak ada system pemerintahan di dunia ini yang tidak memberikan peran kepada Negara untuk menjalankan pembangunan kesejahteraan social. Salah satu bentuk kebijakan pembangunan dengan sasaran pemberdayaan masyarakat adalah dikenal dengan istilah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memacu masyarakat termotivasi tinggi dalam kegiatan pemberdayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui PNPM Mandiri, Ditjen pemberdayaan masyarakat sesuai usulan perencanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola pembangunan melalui dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi, sampai

⁹Edi Suharto, *kebijakan social sebagai kebijakan public dan peran pembangunan kesejahteraan social pekerjaan social dalam mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare) di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 9

dengan memanfaatkan (mengoprasikan) dan memelihara hasil pembangunan adalah sangat menentukan keberlanjutan proses pembangunan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.¹⁰

Agar meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mulai tahun 2015. Melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.¹¹

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tahun 2015 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi;

¹⁰ Fauzi Lendriyono, *beberapa pemikiran tentang pembangunan kesejahteraan sosial*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm 105

¹¹ <http://www.pnpm-mandiri-pedoman-umum-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri>, diakses pada tgl, 1 desember 2016, pukul 09:10 WIB.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen atau sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 2015 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. “Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2019. Pelaksanaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target tersebut.¹²

¹²<http://www.pnpm-mandiri-pedoman-umum-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri>, diakses pada tgl. 1 desember 2016, Pukul 09:12 WIB.

Selama ini Pemerintah telah berupaya meluncurkan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Mulai dari program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp 100.000 per keluarga per bulan, sampai dengan pembagian kartu keluarga miskin (gakin) untuk kepentingan pengobatan gratis, dan berbagai program lain seperti program beras untuk rakyat miskin (raskin). Tetapi dalam tataran implementasi, program yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin itu tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru melahirkan tindakan korupsi gaya baru. Pemerintah menggunakan referensi ganda dalam mendata keluarga miskin baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, kedua lembaga pemerintah ini tidak mampu memberikan data warga miskin yang akurat sehingga dalam pelaksanaan program pemberdayaan rakyat miskin selalu menemui berbagai persoalan.

Kini pemerintah pusat menelurkan program baru yang sasarannya bukan untuk masyarakat secara individu, tetapi membangun infrastruktur umum untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus memberdayakan semua masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Program ini dikemas lewat Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK).¹³

Adapun program pemerintah pada tahun 2005 yaitu program PNPM-Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan

¹³Darmawan Triwibowo, *mimpi Negara kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm 21

Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, seperti : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri. Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang telah direvisi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasaran adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program

ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :

1. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan.
2. Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*).
3. Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.¹⁴

Kelurahan pajangan merupakan salah satu kelurahan yang memperoleh bantuan Program Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Bila dilihat dari aspek dana yang telah berhasil disalurkan di Kelurahan pajangan berjumlah cukup besar, yakni pada tahun 2015 sebesar Rp.150.000.000.- dan pada tahun 2010 sebesar Rp.150.000.000,- pertanyaannya kemudian apakah dana sebesar ini telah sesuai dengan tujuannya, proses dan hasilnya.

Misalnya dana bergulir tidak berkembang dengan baik, karna sampai saat ini belum dapat digulirkan kepada masyarakat miskin lainnya. Di samping itu juga tingkat pendapatan masyarakat juga menurut pengamat penulis dalam informasi dari masyarakat menyatakan belum ada kemajuan yang berarti.

Mengaju dari beberapa indikasi di atas, maka penulis mencoba mengangkat masalah ini untuk menelusuri dan mengidentifikasi pelaksanaan Program Unit

¹⁴<http://www.pnpm.mandiri.pedoman.umum.program.umum.program.nasional.pemberdayaan.masyarakat.desa.mandiri>, diakses pada tgl. 17 februari 2017, Pukul 09:12 WIB

Pengelola Kegiatan (UPK) dalam kaitannya sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan berbagai implementasi kebijakan Program pemerintah melalui Unit Pengelola Kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Pajangan.

1. Bagaimana implementasi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) ?
2. Bagaimana strategi Unit Pengelola Kegiatan dalam memberdayakan masyarakat ?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelaksanaan Program Unit pengelola Kegiatan (UPK) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di kelurahan Sendangsari

1. Mendiskripsikan tentang implementasi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat melalui program unit pengelola kegiatan (UPK).
2. Mendiskripsikan strategi unit pengelola kegiatan (UPK) dalam memberdayakan masyarakat.
3. Mendiskripsikan tentang dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat terhadap kesejahteraan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi Islam, dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat Desa melalui program unit pengelola kegiatan (UPK) untuk membangun ekonomi lokal. Dapat menjadi referensi bagi peneliti yang mengkaji masalah-masalah penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah tentang bagaimana strategi dalam pemberdayaan masyarakat, keberhasilan program pemberdayaan ditandai dengan kesejahteraan masyarakat dan menjadi tolak ukur dalam pembangunan

masyarakat yang berkualitas dimasa mendatang. sebagai bahan masukan bagi pemerintah, fasilitator (UPK) serta stakeholder yang terkait langsung maupun yang tidak langsung dalam pelaksanaan proyek Unit pengelola Kegiatan.

3. Bagi Instansi

Dapat menjadi masukan untuk unit pengelola kegiatan (UPK) Pajangan mengenai program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat dari segi strategi dan keberhasilannya terhadap kesejahteraan masyarakat binaan.

Ahmad Mahyudi, ekonomi pembangunan dan analisis data empiris.(bogor:

Ghalilah Indonesia. 2004)

Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan...*,

Badan kependudukan jogjapro dan statistic periode 6 2016. Kamis 13 April 2017, pukul 13:33 WIB.

Basrowi Suwandi, *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Dapertemen pendidikan dan kebudayaan, *dampak pembangunan ekonomi (pasar) terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat* (yogyakarta: Depdikbud, 1995)

Darmawan Triwibowo, *mimpi Negara kesejahteraan*, (Jakarta: LP3ES, 2006)

Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian ...*,

DRS.H. Siagian, *pembangunan ekonomi dalm cita-cita dan realita*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1989

Edi Suharto, *kebijakan social sebagai kebijakan public dan peren pembangunan kesejahteraan social pekerjaan social dalam mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare) di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2007)

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005)

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan....*,

Fauzi Lendriyono, *beberapa pemikiran tentang pembangunan kesejahteraan social*, (Malang: UMM Press, 2007),

Gunawan Sumodiningrat, *membangun perekonomian rakyat*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998)

Jhingan, *ekonomi pembangunan dan perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007)

Kudi Dipoyud, *Keadilan sosial*, (TT.CV Rajawali, 1995)

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997),

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997)

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program....*,

Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian ekonomi teori dan aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001)

Nanang Fatah, *manajemen strategik berbasis nilai* (Bandung: pt remaja posdaya, 2015)

Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2001)

Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat....*,

Pusat Badan Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta:

Balai pustaka, 2002)

Suarsono muhamad, *manajemen strategik konsep dan alat analisis* (yogyakarta:

sekolah tinggi ilmu manajemen YKPK)

Sugiono, *metode penelitian manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,

2011)

Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

1998)

Supriyono, *manajemen strategi dan kebijakan bisnis*, (Yogyakarta: BPFE Yogya-

karta, 1998)

Yusuf Qardhawi, *norma dan etika ekonomi islam*, (jakarta: Gema insani press,

2001)

Zakia Fuad Chalil, *Pemerataa Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi*

Islam,(Jakarta: Erlangga, 2009)

Jurnal.

Jurnal ekonomi syariah indonesia, *analisis akad pembiayaan mudharobahah dan*

implikasinya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi syariah.

Jurnal ekonomi syariah indonesia, *analisis akad pembiayaan mudharobahah dan*

implikasinya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi syariah

Jurnal ekonomi syariah indonesia, *analisis akad pembiayaan mudharabah dan implikasinya terhadap kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi syariah.*

Bambang Prishardoyo, “*analisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi terhadap produk domestik regional bruto (BDRB) Kabupaten patih tahun 2005*” Vol. 1 No. 1, 2008.

M. suparmoko, *ekonomi pembangunan*, edisi 5, cetakan BPFE-Yogyakarta.

Internet

<http://kec-pajangan.bantulkab.go.id> kamis 16 April 2017, pukul 15:12 WIB

<http://www.pnpm> mandiri pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, diakses pada tgl. 11 February 2017. Pukul 09:30 WIB.

<http://www.pnpm> mandiri pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, diakses pada tgl. 11 February 2017, pukul 09:00 wib

<http://www.pnpm> mandiri pedoman umum program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, diakses pada tgl. 1 desember 2016, Pukul 09:12 WIB.

<http://www.pnpm-mandiri-pedoman-umum-program-umum-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-desa-mandiri>, diakses pada tgl. 1 desember 2016, Pukul 09:12 WIB

<http://www.bkkbn.go.id>, diakses kamis 16 juni 2017, pukul 9:55 WIB.

<http://www.pnpm-mandiri-pedoman-umum-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri>, diakses pada tgl, 1 desember 2016, pukul 09:10 WIB.

www.kemendagri PNPM Mandiri, Rabo 12 April 2017, pukul 14:00 WIB.

www.ris.uksw.edu di akses selasa 29 April 2017, pukul 11:02 WIB

www.upk pajangan. Profil unit pengelola kegiatan. Rabo 14 April 2017, pukul 14:20 WIB.

Data hasil konsolidasi dan pembersihan databes kependudukan oleh dirjen kependudukan. Kamis 13 April 2017, pukul 13:30 WIB.

Skripsi

Abdul Salam, *Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis (Yogyakarta: Program Studi Agama dan lintas Budaya Minat Ekonomi Islam Pascasarjana UGM, 2010)

January Filasufah, *analisis etos kerja pandangan muslim disekitar makam kadilangu serta dampak terhadap peningkatan kesejahteraan*, skripsi,(Semarang: fakultas syariah instuti agama islam negri walisongo)

Merla Liana Herawati (2014) "*pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerajinan tempurung kelapa: studi di dusun Santan, Guwosari, Pajangan, Bantul*" Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Miftahul hikmawati (2016) "*Analisis dampak strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa terhadap kesejahteraan dalam persfektif ekonomi islam melaluwi program kampung ternak dompet dhuafa yogyakarta*", skripsi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Alma ata Yogyakarta.

Nimayah (2015) "*Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui kerajinan perak oleh koperasi produksi pengusaha perak yogyakarta*", Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kali Jaga.

Paramasari, *strategi dinas koperasi dan ukm kota surakarta dalam pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah*, (yogyakarta: bidang akademik universitas Muhamaddiyah Yogyakarta, 2009)

Wulan Mega Ristanti (2014) "*pemberdayaan ekonomi masyarakat di sentra kerajinan tatah sungging wayang kulit di dusun Gendeng, BangunjiwoKasih, Bantul*", Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara.

Muhamad Irwan Susanto, wawancara langsung tanggal 15 Maret 2017

Muh. Mufasir, wawancara langsung tanggal 15 Maret 2017

Warkis, wawancara langsung tanggal 16 Maret 2017

Wakijem, wawancara langsung tanggal 16 Maret 2017

Partini, wawancara langsung tanggal 16 Maret 2017

Sajinah, wawancara langsung 18 Maret 2017

Sri Budiah, wawancara langsung 18 Maret 2017

Wasilah, wawancara langsung 20 Maret 2017

Sajinah, wawancara langsung 22 Maret 2017

Sumarti, wawancara langsung 3 April 2017

Miyem, wawancara langsung 3 April 2017

Partini, wawancara langsung 3 April 2017

Suharni, wawancara langsung 6 April 2017

Ngadiah, wawancara langsung 6 April 2017

Suminah, wawancara langsung 18 Mei 2017

Romlah, wawancara langsung 18 Mei 2017

Sintha Mawarsari, wawancara langsung 18 Mei 2017

Ngatinem, wawancara langsung 20 Mei 2017

Supriati, wawancara langsung 20 Mei 2017

Nunuk, wawancara langsung 20 Mei 2017

Ani Ariasih, wawancara langsung 24 Mei 2017

Sutarni, wawancara langsung 25 Mei 2017